

F Pertanggungjawaban Fungsional

When people should go to the ebook stores, search foundation by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we allow the book compilations in this website. It will very ease you to see guide **F Pertanggungjawaban Fungsional** as you such as.

By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best place within net connections. If you set sights on to download and install the F Pertanggungjawaban Fungsional , it is extremely easy then, previously currently we extend the colleague to buy and create bargains to download and install F Pertanggungjawaban Fungsional thus simple!

Akuntansi Manajemen: Teori dan Praktek - Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si. 2022-06-22

Akuntansi merupakan seni mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan menganalisis transaksi ekonomi. Weygant (dalam Yadiati & Wahyudi, 2007) akuntansi adalah suatu sistem informasi untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Meigs (dalam wikipedia.com, 2008) akuntansi adalah Pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Dalam hal ini, Akuntansi merupakan seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis".

Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual - I Gusti Ngurah Santika, S.Pd., M.Pd

Pembahasan problematika hasil Perubahan UUD 1945 bertujuan membiasakan mahasiswa untuk selalu berpikir kritis dalam memahami fenomena kehidupan bernegara. Sebagai kader pemimpin bangsa, pemikiran kritis mahasiswa perlu dibangun mulai dari level konstitusi. Artinya buku referensi ini menghendaki mahasiswa tidak hanya sekedar membaca dan menghafal Pasal-Pasal UUD 1945, tetapi lebih jauh mampu mengeksplorasi maknanya secara integral. Dengan begitu, niscaya mahasiswa mampu menggali dan menemukan permasalahan yang terkandung dalam hasil Perubahan UUD 1945. Meskipun secara historis, Perubahan UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan. Tetapi khusus untuk pembahasan problematika hasil Perubahan UUD 1945 dalam buku ini adalah difokuskan pada hasil perubahan pertama dan kedua.

Manajemen Organisasi - Sri Dweni Astuti, S.E., M.M. 2022-01-20

Keberadaan manajemen dalam dinamika sehari - hari sangat dibutuhkan, karena kompleksitas kebutuhan serta keinginan manusia sebagai tujuan tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah. Oleh karena itu, manajemen diperlukan sebagai upaya mengatur dan mengelola hal-hal di atas agar tercapai dengan baik dan maksimal. Artinya, manusia dengan berbagai latar belakang akan memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda antara satu sama lain. Perbedaan latar belakang tersebut membutuhkan pengaturan dan pengelolaan yang baik, agar dalam pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan tersebut tidak menimbulkan gesekan, kegaduhan, bahkan pertikaian antar sesama. Organisasi dibutuhkan manusia, tidak sekedar guna pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga guna pemenuhan kebutuhan sosial, hingga kebutuhan akan eksistensialitas. Tidak sedikit orang rela mengeluarkan sebagian dari kepemilikan ekonominya untuk membangun dan memperkuat organisasi. Sebagian lainnya, meninggalkan saudara, keluarga dan kemewahan dunianya demi organisasi. Demikian seterusnya, hingga disebutkan manusia dilabelkan sebagai makhluk organisasi yang berasal dari naluri hidup berkelompok.

Proses Keperawatan dan Soal Uji Kompetensi Ners Indonesia: Lengkap dengan Sembilan Bagian Keilmuan Keperawatan - Dosen Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala 2022-05-30

Uji kompetensi merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh setiap lulusan profesi keperawatan untuk mendapatkan Sertifikat Profesi dan Surat Tanda Registrasi (STR). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa profesi keperawatan untuk dapat lulus tepat waktu dan lulus dalam Uji Kompetensi Ners Indonesia yang dilaksanakan secara berkala. Buku ini merupakan panduan bagi calon Ners dalam mengikuti uji kompetensi sehingga diharapkan dapat membuka wawasan mahasiswa tentang uji kompetensi dan kumpulan soal-soal uji kompetensi. Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) merupakan suatu proses untuk mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya dengan cara

mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesinya.

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH - Herry Supardan, SH., MM.

Sistematika Penulisan Buku pengelolaan keuangan negara dan daerah terdiri dari : Bab I Pengelolaan Keuangan Negara menguraikan tentang Pengelola Keuangan Negara, Penyusunan dan Penetapan APBN, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBN, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Negara dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara Bab II Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan tentang Pengelola Keuangan Daerah, Penyusunan dan Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan Daerah dan Mekanisme Pengelolaan APBD Bab III Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah DKI Jakarta menguraikan tentang Pengelola Keuangan, Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan APBD, Perubahan APBD dan Mekanisme Perencanaan Bab IV Penatausahaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta menjelaskan tentang Bendahara Umum Daerah, Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Mekanisme Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD.

Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral - Dr. T. Mangaranap Sirait, S.H., M.H., CTA. 2021-11-01

Lima abad korporasi ada dan dikenal di Indonesia, dengan masuknya korporasi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tahun 1602 berhasil mengintimidasi subjek hukum orang dan menguras sumber daya alam. Kemudian di masa Orde Lama juga tendensi korporasi melakukan kejahatan ekonomi terdeteksi sehingga terbit UU No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang dan korporasi diteguhkan sebagai subjek Hukum Pidana. Era Orde Baru korporasi dengan konsep bisnis konglomerasi juga hampir membangkrutkan Indonesia dengan krisis ekonomi 1998-1999 dan hingga tahun 2021 utang korporasi Obligor BLBI tersebut belum juga dapat ditagih semuanya oleh negara. Karenanya, sudah waktunya mensistematisasi Hukum Pidana Korporasi secara Integral/Terpadu (Integrated Corporate Criminal Legal System) untuk mengatur secara terpadu: "Corporate Crime Legal Substance yang terdiri dari hukum pidana korporasi materiel, hukum pidana korporasi formal, dan pelaksanaan pidana korporasi; Corporate Crime Legal Structure menyangkut lembaga-lembaga struktur penegak hukumnya; mulai dari badan penyidikan, badan penuntutan dan badan peradilan; dan Corporate Crime Legal Culture antara lain menyangkut perilaku aparat, loyalitas, dan kemampuan teknis aparat dalam bidang ilmu hukum pidana korporasi, berikut kebijakan penegakan pertanggungjawaban pidana korporasi secara integral. Karena jika hukum negara gagal diterapkan, maka yang digunakan adalah logika hukum alam/rimba (legibus sumptis desinentibus lege naturae utendum est)". Sebab, ketidakterediaan sistem hukum pidana korporasi yang sah dan integral akan menjadikan korporasi bagai serigala atas sesama korporasi dan serigala juga bagi subjek hukum orang. Bagi korporasi "bisnis adalah perang" dan akan menggunakan segala daya untuk menjadi pemenang, jikalau hukum pidana korporasi tidak terintegrasi penegakannya. Hukum Pidana Korporasi dan Sistematisasi Penegakannya Secara Integral ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.

Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal - Prof. Dr. Muladi, S.H. 2021-04-20

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1946 jo. UU No. 73 Tahun 1958 yang merupakan "milestone" perkembangan hukum pidana Indonesia dengan "margin of appreciation and legitimation" yang di dasarkan atas penyesuaian terhadap kedudukan RI sebagai negara merdeka atau seluruhnya atau sebagian tidak dapat dilaksanakan atau tidak mempunyai arti lagi, maka dalam pembaharuan hukum pidana melalui

RUU KUHP yang memiliki misi utama "Rekodifikasi Terbuka" membenaran pembaharuan didasarkan atas Ideologi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, HAM dan asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Dalam hal ini aspirasi suprastruktural, infrastruktural, kepakaran dan aspirasi global sangat dipertimbangkan. Dalam proses tersebut penulis selalu mempertimbangkan pentingnya semangat hukum (legal spirits) yang mendasari eksistensi suatu produk perundang-undangan pidana, yang harus dirumuskan dengan baik dan akurat. Tanpa pemahaman terhadap semangat hukum ini (yang tersurat dan tersirat dalam Rancangan Akademis, Konsiderans Undang-undang dan Penjelasan Umum Undang-undang) dan semata-mata hanya mendasarkan pada norma-norma batang tubuh dan substansi serta penjelasan pasal demi pasal suatu undang-undang, penegakan hukum tidak akan memadai hasilnya, karena semangat hukum selalu tidak "value free", khususnya terkait dengan rezim politik yang berkuasa saat Undang-undang dibuat.

Modern Political Constitutions - C.F. Strong 1939

Pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia - Indonesia. President (1967-1998 : Soeharto) 1999

Suku Moi - Dr. H. Hermanto Suaib, M.M 2017-09-11

Buku ini ditulis dari hasil penelitian tentang nilai-nilai pemberdayaan masyarakat lokal pada suku Moi di Kota Sorong. Suku Moi merupakan pemilik ulayat Kota Sorong tetapi miskin atau termarginalkan, baik dalam bidang pendidikan maupun peluang untuk terlibat di eksekutif dan legislatif. Kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli Kota Sorong mengakibatkan konflik dan membatasi partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pembangunan. Di sisi lain, masyarakat Moi memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan modal sosial yaitu nilai-nilai dalam sikap, perilaku dan tindakan serta tradisi - budaya yang dapat menjadi penggerak pemberdayaan di berbagai bidang kehidupan khususnya bidang ekonomi. Masyarakat Moi juga terbuka terhadap nilai-nilai dari luar komunitasnya menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat memupus pandangan bahwa orang Papua sebagai the second class yang telah menciptakan kultur tidak seimbang dalam interaksi antara penduduk asli dan pendatang. Untuk itu, pengelolaan sumber daya manusia suku Moi merupakan kerja sama multistakeholder. Artinya pengelolaan sumber daya manusia suku Moi dilakukan dalam jaringan lembaga masyarakat adat, pendidikan formal, kelompok usaha dan lingkungan masyarakat. Koordinasi dan sinergi diantara stakeholder secara kontinyu dan partisipatif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat suku Moi, berdasarkan nilai-nilai budaya Moi sebagai kearifan lokal maupun modal sosial, merupakan kunci keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat suku Moi di kota sorong.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada TIPIKOR - Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M. 2018-01-02

Tindak pidana korupsi dalam kenyataannya tidak hanya melibatkan orang per orang, akan tetapi bisa juga berkaitan dengan kepentingan korporasi. Dan, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan perwujudan ditempatkannya korporasi sebagai subjek Hukum Pidana. Dalam kaitan ini, Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu, bentuk korporasi dimungkinkan untuk dirintaskan pertanggungjawaban pidananya, termasuk dalam hal tindak pidana korupsi. Konsep hukum tindak pidana ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan, namun hingga kini masih menjadi bahan perdebatan dan cenderung tidak digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Buku rujukan Ilmu Hukum ini menyoroti berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, termasuk perkembangan korporasi sebagai subjek Hukum Pidana dan pengaturannya. dalam Rancangan KUHP, serta dikaitkan pula dengan pembahasan mengenai tindak pidana korupsi dan korporasi di Indonesia. Bahasan utama berkisar tentang: - Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. - Teori pertanggungjawaban pidana korporasi. - Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. - Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. - Korupsi dan korporasi di Indonesia Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup *The Modern State* - Robert Morrison MacIver 1926

Peran dan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Rakyat - Paimin Napitupulu 2005

Role and responsibility of the Indonesian House of Representatives; study on the House of Representatives of Jakarta Province.

Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis di Indonesia - Zico Junius Fernando, S.H., M.H. 2021-09-01

Buku ini disusun oleh penulis agar dapat membantu para mahasiswa, akademi dan praktisi dalam mempelajari tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana Rumah Sakit terhadap malpraktik yang dilakukan tenaga medis di Indonesia karena melihat fenomena-fenomena yang terjadi secara empiris dilapangan (law in action). Penulis pun sangat menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai banyak sekali kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. **Pendekatan Ekonomi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi** - Dr. Asep N. Mulyana 2018-09-03

Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Korporasi merupakan salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M.Hum. Sebelumnya penulis telah menerbitkan sejumlah buku, antara lain Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010), Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010), Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014), dan Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik; Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (2016). Buku ini berisi analisis penulis pada praktik penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia maupun otoritas hukum di berbagai negara. Atas dasar kajian akademis dan pengalamannya sebagai praktisi hukum, penulis menawarkan suatu model pendekatan ekonomi terhadap kejahatan korporasi dan bisnis, yang tidak hanya bertumpu pada filosofi retributif dalam penegakan hukum pidana, tetapi juga senantiasa memperhatikan berbagai faktor ekonomi dan sosial secara menyeluruh.

TEORI PENGANTAR BISNIS - 2020-11-18

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam proses perkuliahan Pengantar Bisnis. Penulis sangat berharap buku ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang Organisasi, Fungsi SDM, Kewirausahaan, dan aspek lain dalam pengembangan bisnis

Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan - Putu Wuri Handayani 2021-02-07

Buku Konsep dan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan (SIK) di Indonesia dan penjelasan konsep Sistem Informasi di rumah sakit, puskesmas, klinik. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan/rekomendasi yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi pandemi di Indonesia. Buku ini juga merupakan update dari buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dalam pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan layanan Kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIK. Buku ini juga menjelaskan konsep dasar sistem informasi/teknologi informasi, manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam pengembangan SIMRS diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tantangan non teknis yang akan dihadapi oleh manajemen. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus dalam pengembangan SIMRS.

Gema Departemen Agama - 1993

Kenang-kenangan Sekber Golkar-Kino-Golkar dari Mukernas ke Munas - V Golkar - Golongan Karya (Organization) 1993

Pemeriksa - 2005

Kewarganegaraan & Masyarakat Madani - Heri Herdiawanto Fokky 2019-04-01

Kewarganegaraan dan masyarakat madani menjadi pembahasan menarik karena ia tidak saja berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam relasi-relasi humanisme, tetapi lebih jauh ia juga meletakkan gagasan spiritual manusia. Gagasan spiritualisme manusia menghubungkan antarmanusia dalam relasi humanis untuk membentuk sebuah komunitas manusia yang beradab. Buku ini mencoba menuangkan pemikiran-pemikiran humanis-religius, dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Pembahasan kewarganegaraan dalam buku ini tidak saja dikaji dari optik pemahaman keilmuan barat semata, tetapi juga dikaji dari sudut optik berpikir dalam keilmuan Islam. Buku persembahan penerbit PrenadaMedia

Musyawah Nasional IV Golongan Karya tanggal 20 s/d 25 Oktober

Panduan Lengkap Pemilu 2019 - I MADE LEO WIRATMA, DKK
2018-05-01

Buku ini sangat penting dan relevan untuk melakukan koreksi dalam pembuatan undang-undang di masa yang akan datang karena beberapa hal sebagai berikut. Pertama, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu proses penyusunannya tidak di tuntun oleh roh, gagasan dan cakrawala yang jelas, yaitu untuk mewujudkan pemerintah yang efektif serta mampu membuat kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak. Sehingga pembahasan hanya bersifat teknis prosedural; wacana yang ditangkap publik, orientasi para pemutus politik hanya distimulir untuk kepentingan subyektif partai politik. Kedua, tertib politik demokrasi sangat rumit dan pelik. Opsi kebijakan atau putusan politik tidak mengenal benar dan salah, karena setiap regulasi memuat pertarungan kepentingan. Oleh sebab itu, meskipun buku ini memaparkan secara detail pilihan sistem pemilu disertai dengan berbagai komparasi dengan negara-negara lain, namun sangat kental dengan transaksi kepentingan. Akibatnya, UU ini terlalu banyak cacatnya, sehingga alih-alih dapat menjadi sarana konsolidasi demokrasi, tetapi justru membuat manajemen kekuasaan negara semakin korup (rusak). Buku persembahan penerbit Formappi

Pengantar sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) - Putu Wuri Handayani 2021-02-07

Buku Pengantar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) menjelaskan konsep Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia dan SIMRS. Dalam pengembangan sistem informasi tersebut diperlukan pemahaman terkait definisi dan layanan yang diberikan oleh rumah sakit serta kebijakan yang diperlukan dalam membangun SIMRS. Buku ini juga menjelaskan konsep dasar sistem informasi/teknologi informasi, manajemen proyek dan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di rumah sakit. Untuk mencapai kesuksesan implementasi SIMRS, selain pengetahuan teknis, dalam pengembangan SIMRS diperlukan pemahaman yang mendalam terkait tantangan nonteknis yang akan dihadapi oleh manajemen. Untuk lebih memahami konsep yang diberikan dalam buku ini, buku ini juga memberikan contoh studi kasus dalam pengembangan SIMRS.

Menuju Indonesia Makmur yang Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dalam Keragaman Agama (Dua Puluh Dua Tahap Membangun Negeri) - Werdha Candratrilaksana 2022-04-08

Pembahasan mengenai reformasi birokrasi dan pembinaan aparatur negara mendapat porsi pembahasan terbesar. Birokrasi diibaratkan sebagai kendaraan yang digunakan menuju tujuan perjalanan. Apabila kendaraan mengalami kerusakan dan kelambatan kinerja, tentunya segala tujuan yang telah direncanakan tidak akan tercapai semestinya. Pembahasan terkait kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, dan belum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut disebabkan penyusunan buku ini dilakukan sebelum 17 Agustus 2011 (sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014).

Namun, di sisi yang lain, beberapa isu yang mengemuka dalam rancangan legislasi nasional dan belum diundangkan, penulis menuliskannya sebagai bagian dari isu yang diadopsi dalam buku ini.

Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi - Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., LL.M., M.M. 2017-01-01

Sebagai korporasi, perseroan terbatas dapat bertindak dalam hukum untuk dan atas namanya sendiri. Direksi adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan jalannya perseroan serta mewakili perseroan di luar maupun di dalam pengadilan. Karenanya tindakan direksi dianggap tindakan perseroan. Di dalam aktivitas korporasi di bidang hukum bisnis terdapat kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum, yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pribadi pengurusnya. Selain itu, bisa saja terdapat penyimpangan dalam bentuk melanggar ketentuan hukum pidana. Bagaimana kedudukan dan tanggung jawab direksi, baik selaku organ perseroan terbatas maupun selaku pribadi, dan perseroan terbatas itu sendiri, apabila ada perbuatan yang merugikan? Apakah perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam ranah hukum pidana dapat dilakukan oleh perseroan terbatas dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dihubungkan dengan unsur kesalahan, serta perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Siap menghadapi ujian nasional 2009 - Losina Purnastuti, Dhyah

Buku Ringkasan terhadap LHP atas LKPD Provinsi di Wilayah Sulawesi: Berdasarkan IHPS Tahun 2019 - Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara - Badan Keahlian DPR RI

Dalam memenuhi amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), DPR RI sebagai salah satu lembaga perwakilan wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dalam rangka untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Termasuk didalamnya pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dilaksanakan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung tugas dan fungsi DPR RI tersebut serta memperkuat referensi dan memudahkan pemahaman terhadap IHPS I Tahun 2019, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI telah membuat ringkasan terhadap LHP atas 34 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi. Ringkasan terhadap LHP atas 34 LKPD Provinsi. Ringkasan ini disusun sebagai bentuk dukungan atas kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah selama periode satu tahun anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Islam fungsional - Eggi Sudjana 2008

Socioeconomic, political, legal, and theological aspects of Islam in Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - Tim Redaksi

Pemilu merupakan mekanisme demokratis untuk menentukan pemimpin yang akan membentuk pemerintahan serta memilih wakil rakyat guna mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E disebutkan bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu secara berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi, partisipasi, dan keterwakilan. Sehubungan dengan itu, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai penjabaran yang bersifat teknis dari konstitusi. Undang-undang ini disusun dengan prinsip menyederhanakan, menyelaraskan, serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam beberapa undang-undang terdahulu. Penyempurnaan aturan diperlukan guna menjawab dinamika politik mengenai pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, penegakan hukum, serta penguatan kelembagaan pelaksana Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis merupakan harapan bersama. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini wajib dan perlu dipahami oleh segenap warga negara Indonesia agar dapat menggunakan hak konstitusionalnya, baik memilih maupun dipilih, secara bermartabat dan bertanggung jawab.

Menguasai fungsi kepatuhan bank (cover baru) - Ikatan Bankir Indonesia 2018-04-09

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana, serta kepercayaan dari nasabah yang menempatkan dananya di bank. Meningkatnya kompleksitas perkembangan kegiatan usaha bank berdampak pada meningkatnya perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan yang pada akhirnya akan berdampak juga pada peningkatan eksposur risiko yang dihadapi. Kepatuhan merupakan tanggung jawab seluruh personel bank sehingga setiap jenjang/tingkatan organisasi pada seluruh kegiatan usaha bank memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap terciptanya budaya kepatuhan (compliance culture). Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan sebagai supporting unit atau strategic business partner bank memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bank dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan.

UPDATE PALING LENGKAP UNDANG-UNDANG PEMILU : UU REPUBLIK IND - TIM GRASINDO 2017-11-20

Update Paling Lengkap Undang-Undang Pemilu : UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Mimbar BP 7 - 1988

Akuntansi Pemerintah Edisi 1 - Heru Kreshna Reza 2022-05-12

Buku Akuntansi Pemerintahan ini dibuat dan dirancang sebagai bahan ajar yang dapat membantu mahasiswa khususnya didalam menjawab permasalahan yang berhubungan dengan sistematis pencatatan serta

pelaporan akuntansi bagi pemerintah. Organisasi bisnis dan pemerintahan memiliki struktur pembukuan yang berbeda yang kemudian berakibat pada praktek akuntansi dalam dua organisasi tersebut. Buku ini disusun mengacu pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) pada program studi akuntansi pemerintah. Buku ini merupakan edisi pertama yang dapat digunakan sebagai bahan ajar selama setengah semester. Buku akuntansi pemerintah ini memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pembaca mengenai konsep dasar akuntansi keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi keuangan daerah, beberapa teori dan standar akuntansi sektor publik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah, informasi mengenai keuangan negara harus relevan dan tercatat dengan baik. Sistem pencatatan dan pembukuan tersebut dikenal dengan istilah akuntansi pemerintahan. Adanya pencatatan keuangan tersebut mendasari terciptanya standar dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk pihak-pihak terkait mulai dari DPR, BPK, hingga masyarakat. Jika akuntansi pemerintah tidak berjalan dengan baik, maka keuangan negara tidak akan terkontrol dan tidak proporsional antara pengeluaran dan penghasilannya. Buku ini memberikan kontribusi pemahaman kepada pembaca dalam memahami konsep akuntansi dan laporan keuangan pemerintah (daerah), memberikan latihan kepada mahasiswa yang telah memahami konsep akuntansi pemerintahan (sektor publik). Mahasiswa mampu menganalisis Informasi pemda dan mengerjakan proses akuntansi laporan keuangan daerah dengan menghitung dan mengalisa setiap transaksi akuntansi yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan pemda (unit SKPD). Pada studi kasus diberikan beberapa contoh akuntansi sektor swasta dan akuntansi sektor pemerintahan, agar mahasiswa dapat membedakan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi sektor swasta.

Akuntansi Manajemen - Rahmi Handayani SE., M.S.Ak, Septini Kumalapatni, S.E., M.B.A 2021-12-22

Informasi akuntansi manajemen dibutuhkan dan digunakan dalam semua lingkup manajemen. Informasi akuntansi manajemen membantu para manajer menjalankan perannya dalam melakukan aktivitas perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen dikelola dalam suatu sistem, yaitu sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Tidak ada suatu kriteria formal yang menjelaskan sifat dari input atau proses, bahkan output dari sistem informasi akuntansi manajemen.

Trusted Criminals - David O. Friedrichs 2007

This comprehensive text helps students understand the problems involved in studying white collar crime, explanations for crime, the principal focus of the crimes, and the character of the legal and criminal justice response to the crime.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa - Timbo Mangaranap Sirait 2020-03-01

Buku ini disajikan dalam 5 Bab yang memuat kajian mengenai perkembangan dan perluasan pertanggungjawaban pidana korporasi di era ekonomi digital, penerapan asas ne bis in idem dalam menangani tindak pidana korporasi, implementasi hukum pidana korporasi dengan sistem peradilan pidana integral, serta perkembangan hukum pidana korporasi dan hubungannya dengan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dari Masa Ke Masa* ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Pemilihan umum 1987 - Indonesia. Lembaga Pemilihan Umum 1988

Cara Mudah UN 08 Eko SMA (SKL) -

Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan - Sukardi 2022-07-28

Buku ini bertujuan selain untuk memenuhi permintaan tentang bagaimana mempelajari konsep-konsep evaluasi program dengan cara yang lebih komprehensif dan berorientasi praktis melalui penerapan permasalahan nyata, juga sebagai usaha penulis untuk memenuhi permintaan untuk diterbitkannya karya ilmiah bagi para guru, para mahasiswa, dan praktisi pendidikan lainnya. Pembahasan evaluasi program pendidikan dan kepelatihan didasarkan pada prinsip-prinsip evaluasi dan terapannya di lapangan, yang baik di dalam penelitian maupun evaluasi program dan proyek pendidikan dan kepelatihan Penulis terlibat aktif. Tinjauan dari aspek konsep dan empiris evaluasi program direncanakan dalam enam belas bab dan disusun dengan model modul yang penerapannya dilengkapi dengan soal dan latihan. Buku ini terdiri dari empat bagian dan setiap bagian mencakup empat bagian seperti berikut. Bagian I terdiri atas pembahasan mengenai Evaluasi Program Pendidikan dan Kepelatihan; Sejarah Evaluasi; Posisi Evaluasi Program; Tingkatan Implementasi dalam Evaluasi Program. Bagian II terdiri atas pembahasan mengenai Desain Evaluasi Program; Pengumpulan Informasi Evaluasi Desain Evaluasi Program; Mengembangkan Instrumen Evaluasi Program; dan Analisis dan Interpretasi Data. Kemudian, Bagian III mencakup pembahasan mengenai Monitoring dan Evaluasi Program Diklat; Menyusun Laporan Evaluasi Program; Evaluasi Diri Lembaga Diklat; dan Penilaian Akreditasi. Terakhir Bagian IV membahas mengenai Evaluasi Kebutuhan; Penelitian Evaluasi; Penilaian Portofolio; dan Prospek Evaluasi Program.